

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data-data dan pembahasan yang ada, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

1. Terkait dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola modal kerja dan komponen-komponen modal kerja. kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PTPN XII dalam mengelola modal kerjanya yaitu :
 - a. Adanya pengendalian terhadap anggaran modal kerja PTPN XII melalui PPAP yang merupakan anggaran yang dilakukan tiap triwulanan atau tiga bulan sekali dan permintaan modal kerja yang dilakukan tiap masa (tanggal 10,20,30) di tiap bulannya. Dari PPAP dan Permintaan modal kerja yang diajukan pihak kebun kepada kantor direksi yang dalam hal ini pemberi modal kerja, maka PTPN XII bisa melihat bagaimana kebutuhan riil di kebun dan unit kerja lainnya sehingga modal kerja bisa efektif dan efisien.
 - b. Pada tahun 2010, PTPN XII melakukan kebijakan tentang adanya penetapan limit saldo kas maksimal di tiap masa atau tiap sepuluh hari untuk tiap unit kerja. hal ini dilakukan agar perusahaan bisa mencukupi modal kerjanya tanpa harus kekurangan dalam melakukan kegiatan

operasional perusahaan karena penetapan limit saldo kas ini merupakan hasil dari evaluasi kinerja kas dari beberapa tahun yang lalu.

- c. Piutang niaga perusahaan hanya berlaku ketika terjadi penjualan ekspor dimana pihak importir melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak. kemudian untuk penjualan lokal, tidak ada piutang yang terjadi karena pihak *buyer* harus melakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum mendapatkan barangnya.
 - d. Adanya kebijakan memaksimalkan proses produksi dengan mempertimbangkan keadaan pasar dan cuaca
 - e. kebijakan dari pemerintah mengenai target pertumbuhan aset dan laba yang minimal harus dipenuhi salah satunya di tiap akhir tahun Adanya penetapan target laba dari telah memberikan *pressure* yang positif bagi PTPN XII karena perusahaan terus berupaya dalam melakukan efisiensi dan efektifitas modal kerja mereka sehingga target peningkatan *profit* dan aset dari pemerintah dapat terpenuhi dan perusahaan mendapatkan nilai sehat (AA) dari pemerintah.
2. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan diatas bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas terhadap modal kerja perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang dapat dilihat dari dari pemaparan berikut ini :
- a. Pengendalian terhadap modal kerja yang dilakukan perusahaan telah membuat modal kerja mereka bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada modal kerja yang dialokasikan untuk hal yang tidak

perlu sehingga pengeluaran dapat diimbangi dengan profit yang maksimal.

- b. Penetapan limit saldo kas maksimal ditiap unit kerja yang dilakukan perusahaan telah memberikan kecukupan modal bagi tiap unit kerja secara optimal sehingga berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
- c. Dengan adanya kebijakan piutang yang dilakukan PTPN XII, maka diharapkan piutang dari PTPN XII bisa tetap baik karena perusahaan tidak telalu terlibat banyak piutang yang beresiko dengan pihak *buyer* sehingga tidak terlalu banyak modal kerja yang tertanam di piutang sehingga bisa digunakan untuk kegiatan operasional lainnya dan perusahaan bisa memaksimalkannya untuk peningkatan laba.
- d. Produksi yang maksimal dengan pertimbangan berdasar keadaan kondisi pasar dan cuaca membuat persediaan tidak terlalu banyak ditahan dan penjualan tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar sehingga membantu peningkatan profitabilitas perusahaan.

5.2 Saran

1. Perusahaan bisa lebih jeli lagi dalam melihat keadaan perekonomian baik di dalam dan di luar negeri dengan mencari banyak referensi sebelum membuat kebijakan untuk modal kerja dalam produksinya agar tidak terjadi lagi kehilangan kesempatan dalam investasi untuk meningkatkan profit seperti yang terjadi pada tahun 2009.
2. Dengan banyaknya Modal Kerja PTPN XII yang mencakup berbagai wilayah dan unit kerja dari PTPN XII itu sendiri, maka perlu kiranya PTPN XII untuk

mengklasifikasikan lagi jenis-jenis modal kerja mereka agar tidak terjadi salah pengertian dalam mengartikan modal kerja mereka dan untuk mengetahui klasifikasi modal kerja perusahaan.

3. Koordinasi antar unit kerja mulai dari kantor direksi, kebun, rumah sakit, sampai industri hilir tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran modal kerja sudah cukup baik karena mampu melakukan evaluasi yang menghasilkan sebuah kebijakan seperti pada tahun 2010 sudah cukup baik. Evaluasi antar unit kerja seperti itu perlu sering dilakukan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas modal kerja yang lebih baik lagi dalam rangka menghadapi persaingan global di perekonomian dunia terutama di bidang perkebunan.
4. Dengan masih banyaknya kekurangan yang dirasakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema dan bidang yang sama untuk memperluas lagi analisisnya dengan penambahan komponen modal kerja yang berupa ekuitas dengan objek yang sudah *go public* karena objek yang ada pada penelitian ini bukanlah objek yang *go public*. selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa mengambil objek yang bergerak dibidang lain seperti perusahaan yang bergerak dibidang perikanan atau pertambangan yang merupakan salah satu bidang yang kekayaannya juga dipunyai oleh Indonesia dimana nantinya bisa dikaji bagaimana pengelolaan modal kerjanya dan apa saja faktor yang berpengaruh di dalam pengelolaan modal kerja di perusahaan tersebut.